



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Perpustakaan Nasional
Hari/Tanggal	: Senin, 14 September 2015.
Pukul	: 10.15 – 13.15 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: DR. H. Abdul Kharis Almasyhari/Wakil Ketua Komisi X DPRRI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPRRI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L 2016; 2. Lain-lain.
Hadir	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Kepala Perpustakaan Nasional beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/DR.H. Abdul Kharis Almasyhari, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. PAGU ANGGARAN RAPBN TA 2016 SEBESAR RP701.101.136.000,-

1. Terhadap Surat Menteri Keuangan No. S-505/MK.02/2015 tgl. 7 Juli 2015 perihal Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian RKA K/L TA 2016, pagu anggaran (sementara) Perpunas TA 2016 sebesar Rp701.101.136.000,- (*Tujuh ratus satu miliar seratus*

satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

2. Dalam rangka pendalaman tersebut, Komisi X DPR RI memberikan beberapa masukan sebagai bahan perbaikan penyusunan program diantaranya:
 - a) Terhadap anggaran program pengembangan perpustakaan sebesar Rp200.000.000.000,- (*Dua ratus miliar rupiah*), Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
 - b) Usulan program yang diusulkan harus dapat menjawab berbagai kendala dan permasalahan, diantaranya tentang kurangnya tenaga pengelola perpustakaan, terbatasnya koleksi, kurangnya apresiasi pemerintah daerah, masih kurangnya pemahaman para pemimpin daerah terhadap pentingnya keberadaan perpustakaan, dan belum terwujudnya budaya membaca masyarakat.
 - c) Perlu menelaah postur anggaran yang terbagi dalam 3 (tiga) program sudah maksimal atau masih dapat dimaksimalkan.
 - d) Perlu penyusunan strategi baru untuk mengubah wajah dan fungsi perpustakaan yang lebih menarik masyarakat, lebih meningkatkan pembudayaan membaca, dan budaya maritim.
 - e) Berdasarkan data perkembangan perpustakaan di Indonesia yang masih rendah dan permasalahan yang ada maka metode program pembudayaan membaca yang selama ini berlangsung perlu perubahan yang mempunyai pengaruh lebih besar ke masyarakat dan lebih berpengaruh untuk revolusi mental (tidak sekedar seremonial) yang salah satunya dengan lebih meningkatkan promosi pembudayaan membaca dan penyediaan kecukupan bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka.
 - f) Perlu kajian lebih mendalam terhadap kebijakan perpustakaan desa dan perpustakaan satuan pendidikan, agar program perpustakaan desa dan perpustakaan satuan pendidikan dapat sejalan dengan kebijakan program dana desa melalui kerjasama dengan Kemendagri RI dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
 - g) Perlu lebih meningkatkan kinerja untuk memenuhi amanat UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan lebih mendayagunakan Perpustakaan Provinsi.

B. SURAT KEPALA PERPUSNAS NO. 940/1/c/VI.2015 TANGGAL 30 JUNI 2015 PERIHAL USUL TAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR RP1.502.500.000.000,-

1. Terhadap tembusan surat Kepala Perpustakaan No. 940/1c/VI.2015 tgl. 30 Juni 2015 perihal usul tambahan anggaran sebesar Rp1.502.500.000.000,- (*Satu triliun lima ratus dua miliar lima ratus juta rupiah*), Komisi X DPR RI masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
2. Dalam rangka pendalaman tersebut, Komisi X DPR RI memberikan masukan sebagai berikut:
 - a) Usulan program harus dapat menjawab permasalahan perpustakaan utamanya terhadap kurangnya tenaga pengelola perpustakaan, terbatasnya koleksi, kurangnya apresiasi pemerintah daerah, masih

kurangnya pemahaman para pemimpin daerah terhadap pentingnya keberadaan perpustakaan, dan belum terwujudnya budaya membaca masyarakat.

- b) Perlu membuat usulan alternatif bilamana usulan tambahan yang diajukan terpenuhi sebagian atau tidak terpenuhi.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB.

KETUA,



DR.H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI